

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Al-Ikhwan al-Muslimun (selanjutnya disebut IM) merupakan gerakan Islamis dunia yang menyediakan model aktivisme berbasis agama bagi gerakan yang meniru atau menjadi cabangnya.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, IM telah bertransformasi menjadi gerakan transnasional yang tak diragukan lagi merupakan kelompok politik yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam kontemporer, melalui banyak struktur dan asosiasi.<sup>2</sup> Bukti bahwa gerakan IM telah menjadi gerakan transnasional dapat dilihat berdasarkan data internal yang disampaikan Mohammed Mahdi Akef, eks-pemimpin tertinggi *Ikhwanul Muslimin* Mesir yang mengatakan dalam sebuah wawancara, “Kami eksis di 70 negara.”<sup>3</sup> Bahkan ia tidak menampik realita mengenai jejaring “*Ikhwanul Muslimin* Internasional”.<sup>4</sup> Pada dasarnya, jaringan transnasional didirikan sebagai manifestasi mobilitas dan solidaritas yang secara permanen akan menciptakan hubungan antara ruang geografis dan nasional yang berbeda.<sup>5</sup>

Perkembangan IM sendiri tidak lepas dari pengaruh Hasan al-Banna yang merupakan pemimpin sekaligus pendiri IM yang didirikannya pada Maret 1928

---

<sup>1</sup>Richard Mitchell mencatat adanya kebingungan tentang tanggal yang sebenarnya pendirian Ikhwanul Muslimin; beberapa data menyebutkan gerakan ini didirikan pada bulan April-Mei 1929. Richard P. Mitchell, *The Society of the Moslem Brothers*. London, Oxford University Press, 1993, hlm. 8, footnote 19, dalam Anthony Bubalo, Greg Fealy, and Whit Mason, *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*, trans. Syamsu Rijal (Lowy Institute for International Policy: Komunitas Bambu, 2012), 17.

<sup>2</sup>Samir Amghar, “Europe puts Islamists to the Test: The Muslim Brotherhood (France, Belgium and Switzerland),” *Mediterranean Politics* Vol. 13, No. 1 (March 2008): 68.

<sup>3</sup>Steven G. Merley, *Turkey, The Global Muslim Brotherhood, and the Gaza Flotilla* (Jerusalem: Jerusalem Centre for Public Affairs, 2011), 28

<sup>4</sup>*Ibid.*, 28.

<sup>5</sup>Samir Amghar, *Europe puts* 65.

atau Dhu al-Qi'da 1347 di Ismailiyyah, Mesir.<sup>6</sup> Sepanjang satu dekade, kharisma pemimpin, kekuatan dan keluasan organisasi ini, menjadikan IM sebagai aktor politik terdepan di Mesir maupun diluar Mesir. Menurut al-Banna dan muridnya, Islam tidak hanya sebuah agama yang terbatas pada praktik ritual, tapi juga sistem dunia yang memerintah atas semua bidang kehidupan. Al-Banna berpandangan bahwa Islam didirikan untuk tiga hal “*Din, duniya wa dawla*” (‘agama, kehidupan dan negara’). Dalam doktrin Ikhwan, prinsip ini diindikasikan dengan konsep “*chumuliyya al-Islam*” (“Islam sebagai sistem total”). Berkat metode kontrol sosial melalui penggabungan kegiatan sosial yang berlandaskan aktivisme agama, IM dalam beberapa dekade telah menjadi aktor sentral dalam bidang politik negara.<sup>7</sup>

Setelah Perang Dunia Kedua, IM menjadi semakin berkembang baik dari sisi keanggotaan maupun cabang organisasi. Menurut Majalah *Ikhwanil Muslimin* No. 186, 12 Desember 1946, jumlah anggota Ikhwan dari kalangan buruh berkisar antara 300 dan 600 ribu jiwa, belum termasuk mahasiswa. Sementara itu, dalam kata pengantar memoir al-Banna, disebutkan bahwa cabang IM di seluruh Mesir mencapai 1700. Namun, majalah *Ad-Da'wah* No. 61, 15 April 1952, malah menyebutkan angka 2000.<sup>8</sup> Semua pencapaian ini merupakan hasil dari kombinasi keterampilan organisasi dan kepemimpinan karismatik.<sup>9</sup>

Dalam perjalanannya, IM seringkali mengalami hubungan pasang surut dengan rezim berkuasa di Mesir. Setelah revolusi 23 Juli 1952, hubungan antara IM dan pemerintah Mesir berkembang melalui beberapa tahap: (1) Periode antara

---

<sup>6</sup>Anthony Bubalo, Greg Fealy, and Whit Mason, *Zealous Democrats*, 17.

<sup>7</sup>Samir Amghar, *Europe puts*, 68.

<sup>8</sup>Ishak Musa Al-Hussaini, *Ikhwanul Muslimun: Tinjauan Sejarah Gerakan Islam (Bawah Tanah)* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 25.

<sup>9</sup>Norman Sattar, "Al Ikhwan Al Muslimin" (Society of Muslim Brotherhood) Aims and Ideology, Role and Impact," *Pakistan Horizon*, Vol. 48, No. 2 (Spring 1995): 10.

bulan Juli 1952 dan Maret 1954 merupakan tahap konsiliasi antara Ikhwan dan Perwira Bebas (*Free Officers*)<sup>10</sup>. Sikap damai diadopsi oleh rezim tersebut, seperti membebaskan semua anggota IM yang dipenjarakan oleh rezim lama, serta membuka penyelidikan resmi untuk mencari pembunuh Hassan al-Banna. Selain itu, setelah ditetapkannya undang-undang yang melarang kegiatan politik pada tanggal 16 Januari 1953, otoritas pemerintah tetap memberi wewenang kepada IM untuk melanjutkan kegiatannya dengan dalih bahwa ini adalah hubungan dengan tujuan keagamaan. (2) Periode antara 1954 dan 1970 adalah periode ketegangan dalam hubungan antara gerakan IM dan Nasser. Pada tahun 1954, enam anggota Ikhwan dieksekusi mati, sedangkan Pemimpin Tertinggi / *supreme guide* (yang sekarang seperti Hasan al-Hudaybi) dihukum seumur hidup dan lebih dari 800 anggota IM diberi hukuman penjara yang panjang sementara ribuan orang dipenjara tanpa pengadilan.

Meskipun Pemerintahan Nasser menghukum banyak anggota IM, namun pada tahun 1964 Nasser memutuskan untuk melakukan amnesti umum, membebaskan semua anggota IM, untuk mengimbangi pengaruh komunis, yang telah dibebaskan juga. Namun sekali lagi, pada tahun 1965, IM dituduh berencana untuk menggulingkan Nasser; banyak yang ditangkap sepanjang sisa tahun 1965 dan paruh pertama tahun 1966, dan pada akhir Agustus 1966 tiga pemimpin utama digantung. (3) Periode 1970-1981, ketika IM diizinkan untuk terlibat meningkatkan peran dalam kehidupan politik Mesir.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Free officers* merupakan Kelompok yang melakukan kudeta pertama kali pada Raja Farouq pada tahun 1952.

<sup>11</sup>Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner, "Modern Islamic Reform Movements: The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt," *Middle East Journal* Vol. 36, No. 3 (Spring 1982) 342.

Pelantikan Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir pada tahun 1981 menjadi fase baru dalam perkembangan IM. Dimulai pada pertengahan 1980-an, IM memperluas kehadirannya di berbagai bidang kehidupan publik dan dengan cepat memosisikan diri sebagai pemimpin oposisi. Dari sini, kita melihat peningkatan yang jelas dalam referensi *Ikhwanul Muslimin* tentang norma-norma demokrasi global dan hak asasi manusia. IM menggunakan mekanisme demokrasi untuk menantang kondisi pelarangan atas aktivitas kelompok tersebut. Namun, penekanan baru ini juga mencerminkan kepekaan kader aktivis IM yang menyebut diri mereka sebagai *al-tayyar al-islahi*, tren reformis.<sup>12</sup>

Pra *Arab Spring* merupakan masa pencapaian pengaruh IM yang hampir tidak terbayangkan. Hal ini terlihat ketika kemenangan gemilang berhasil diraih IM pada pemilihan parlemen bulan November 2011 sampai Januari 2012, dan lima bulan kemudian, 30 Juni 2012, Muhammad Mursi, seorang tokoh senior IM, menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir.<sup>13</sup>

Namun, kemenangan IM tidak berjalan dengan mulus. Ada serangkaian krisis konstitusional dan politik yang berliku-liku yang menghancurkan negara itu pada musim semi dan musim panas 2012. Kemajuan IM telah memicu tekanan balik yang signifikan dari pejabat tinggi di negara tersebut. Ketegangan di lingkup pemerintahan dan politik Mesir mencapai puncaknya pada pertengahan Juni. Pertama, *Supreme Council of Armed Forces* (SCAF), yang bertindak berdasarkan sebuah keputusan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Constitutional Court/SCC*),

---

<sup>12</sup>Carrie Rosefsky Wickham, *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement*(New Jersey: Princeton University Press, 2013), 46.

<sup>13</sup>Ibid.,248.

membubarkan parlemen pimpinan IM.<sup>14</sup> Kedua, SCAF menambahkan rumusan pasal pada Deklarasi Konstitusional Maret 2011, yang berimbas pada di tetapkannya undang-undang mengenai otoritas legislatif untuk dirinya sendiri, lepasnya kontrol presiden atas masalah pertahanan dan keamanan nasional, dan memberikan wewenang veto kepada militer dan pengadilan atas konstitusi yang baru.

Tindakan SCAF terhadap Pemerintah Mursi ini dipandang sebagai "kudeta lunak (*soft coup*)", dimana penentuan anggota senior militer dan pengadilan menjadi sorotan utama demi mempertahankan kontrol atas persyaratan transisi Mesir dan mencegah IM untuk memonopoli kekuasaan. Pada saat yang sama, IM juga menghadapi tekanan terus menerus dari kekuatan sekuler dan liberal untuk menghormati semangat pemberontakan yang demokratis dan inklusif dalam menggulingkan Mubarak. Sehingga, panggung pemerintahan mesti berlaku secara merata, bukan monopoli satu pihak saja.<sup>15</sup>

Penolakan terhadap Mursi sendiri didasari atas asumsi bahwa ia akan membawa Mesir menjadi negara Islam, hal yang bertolak belakang dengan corak Mesir yang cenderung sekuler.<sup>16</sup> Massa bahkan kembali bergejolak setelah Mursi mengeluarkan dekritnya pada Kamis 22 Novemeber 2012. Dekrit itu berisi pernyataan bahwa Mursi memiliki otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Namun, Mursi sempat berdalih, bahwa dekrit yang dikeluarkannya justru untuk melindungi revolusi, kehidupan bangsa, keamanan, persatuan dan kesatuan nasional. Mursi berjanji akan melepaskan segala

---

<sup>14</sup>Ibid., 248.

<sup>15</sup>Ibid., 248.

<sup>16</sup>Ali Munhanif, "Berakhirnya Revolusi Tanpa Ideologi," *Gatra*, September 24, 2013, 87.

kekuasaannya itu, ketika undang-undang baru sudah disusun dan disahkan. Tidak seperti yang diharapkan, Mursi malah dituding menumpuk kekuasaan, dan ingin menjadi diktator baru yang sama dengan Mubarak hanya saja dengan cara dan wajah yang berbeda.<sup>17</sup>

Pada Rabu 3 Juli 2013, Mursi resmi digulingkan oleh militer Mesir yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah Al Sisi, Kepala Angkatan Bersenjata yang sebenarnya diangkat langsung oleh Mursi menggantikan Jenderal Husein Tantawi dengan dalih untuk mereduksi semua hal yang berbau rezim Mubarak. Sebelum Kudeta, Al-Sisi telah mengumumkan ultimatum 48 jam menuntut agar Mursi mundur, menahan Mursi pasca Kudeta dan menangkap serta menembaki anggota IM yang dianggap pendukung militan Mursi sejak 1 Juli 2013. Bila tidak berhasil, militer akan melakukan kudeta sebagai bentuk menyelamatkan negara. Ancaman yang akhirnya benar-benar dilakukan oleh Al-Sisi.<sup>18</sup>

Disamping hubungan yang pasang surut dengan rezim di Mesir, dari tahun 1940an, pengaruh IM sendiri telah bergerak melampaui perbatasan Mesir dan menyebar ke seluruh dunia Arab-Muslim, seperti, Yordania, Syria dan Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat). Namun dalam perjalanannya, IM sebagai gerakan transnasional selalu menghadapi tantangan dari pemerintah di berbagai negara. Di Mesir sebagai negara kelahirannya, IM seringkali mengalami hubungan yang tidak menentu, tergantung pada rezim yang berkuasa. Suatu waktu IM dinyatakan organisasi resmi, namun bisa saja mereka diklaim sebagai organisasi terlarang

---

<sup>17</sup>Trias Kuncahyono, *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013), 23.

<sup>18</sup>Ayyubi, Miftachul Choir Al. "Militer dan Politik: Studi Kasus Kudeta Militer Pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir Tahun 2013." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015. 8.

dikarenakan aktivitas yang dilakukan. Puncak dari ketegangan antara IM dan Pemerintah Mesir saat ini adalah ketika setelah kudeta 3 Juli 2013, IM dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara Mesir oleh pemerintahan Al-Sisi.<sup>19</sup> Di Yordania, IM telah menikmati banyak kesuksesan dalam usaha pengorganisasiannya, tetapi juga menghadapi tantangan yang kuat dari rezim yang berkuasa. Pemerintah Yordania membiarkan IM bertindak secara terbuka, mengikuti pemilihan umum dan bahkan memenangkan banyak kursi parlemen, meskipun hasil akhir tetap akan memenangkan pemerintahan pro-rezim. Sementara dalam kasus Suriah, IM adalah organisasi bawah tanah yang tidak memiliki ruang untuk bertindak di hadapan publik sama sekali.<sup>20</sup> Begitupun dengan di Eropa, impian besar IM untuk menciptakan masyarakat baru melalui pembentukan negara Islam tidak mungkin direalisasikan. Lelahnya retorika Islam dan runtuhnya dorongan utopia dalam Islam telah menyebabkan para pemimpin organisasi ini memperbarui posisi ideologis organisasi tersebut. Jadi, dari tahun 1989 citra Islamisme berubah dengan realisasi ketidakmungkinan kembali kemenangan ke negara asal. Marginalisasi retorika Islam ditekankan oleh mutasi hebat yang dialami Islam di Prancis dan Belgia pada periode ini. Islam dianggap bukan lagi agama imigran yang bertekad untuk kembali ke negara asal mereka, namun telah menjadi agama yang taat, pada saat generasi baru Muslim, yang lahir dan dididik serta kemudian muncul dan mencari Islam di Eropa. Oleh karenanya, IM dapat dipahami sebagai struktur yang berusaha menjadi wakil dan pembela

---

<sup>19</sup>Shaimaa Magued, "The Egyptian Muslim Brotherhood's transnational advocacy in Turkey: a new means of political participation," *British Journal of Middle Eastern Studies* (2017), 8

<sup>20</sup>Barry Rubin, eds., *The Muslim Brotherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 1-2.

umat Islam di Eropa dan tidak lagi menggaungkan tentang pemberlakuan doktrin Ikhwan tentang konsep “*chumuliyya al-Islam*”(“Islam sebagai sistem total”).<sup>21</sup>

Saat beberapa negara melakukan tindakan represif dan pelarangan terhadap IM, Pemerintah Turki justru menerima keberadaan IM di negaranya. AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*/Partai Keadilan dan Pembangunan) sebagai partai berkuasa di Turki telah membiarkan unsur-unsur kunci dari *Ikhwanul Muslimin* Global, dan Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (*International Union of Muslim Scholars/IUMS*), organisasi pimpinan Sheikh Youssef Qaradawi yang juga merupakan Pemimpin Spiritual IM untuk beroperasi secara bebas di wilayah Turki. Bahkan sejumlah besar konferensi diadakan di Istanbul, disponsori dan/atau dihadiri oleh pemimpin *Ikhwanul Muslimin* Global. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Turki dibawah AKsP sejak tahun 2006.<sup>22</sup> Menurut analisis urusan Turki, Pemerintah Turki juga merupakan bagian dari jaringan ini, serta AKP dibawah Erdogan terkait dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* yang lebih besar.<sup>23</sup>

Kedekatan hubungan antara IM dengan Turki yang berimplikasi besar terhadap penerimaan seluruh aktivitas politik IM terkini dapat dirunut pada beberapa peristiwa. Dalam kasus IM Mesir setelah terjadinya Kudeta, pada bulan Agustus 2014, mereka telah menciptakan Dewan Revolusi Mesir di Istanbul sebagai *platform* anti-rezim yang menganut prinsip revolusi 25 Januari. Meskipun ekspatriat pergi ke berbagai tujuan, Turki menerima ribuan anggota IM setelah

---

<sup>21</sup>Samir Amghar,*Europe puts*, 72.

<sup>22</sup>Steven G. Merley, *Turkey, The Global Muslim Brotherhood, and the Gaza Flotilla* (Jerusalem: Jerusalem Centre for Public Affairs, 2011), 8.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 26.



penggulingan Mursi. Dengan mencari alat advokasi yang lebih efisien, ekspatriat IM menciptakan saluran TV yang-tidak seperti media pro-oposisi Turki-mendapat dukungan hukum dan finansial dari Perdana Menteri saat itu Erdogan, untuk bertindak sebagai oposisi jauh dalam upaya menyerukan restitusi demokrasi.<sup>24</sup>

Dukungan terhadap IM juga diperlihatkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dengan berulang kali mengecam kudeta militer di Mesir dan menuduh pemerintahan transisi Mesir melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintahan transisi di Mesir menuduh partai AKP pimpinan Erdogan mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Hubungan diplomatik semakin memburuk setelah kedua negara menarik duta besarnya.<sup>25</sup> Selain itu, dalam satu kesempatan wawancara pada februari 2017, menanggapi kebijakan Amerika Serikat untuk memasukkan IM kedalam daftar organisasi teroris, Erdogan dengan terang menyebutkan bahwa “secara personal ia tidak menganggap IM sebagai organisasi teroris dan bukan pula kelompok bersenjata, tapi IM sebenarnya merupakan organisasi ideologis.”<sup>26</sup>

Sementara itu, melihat fenomena kedekatan IM dan Pemerintah Turki yang dipimpin oleh AKP, analisis tentang Turki, Soner Cagaptay menjelaskan bahwa:

*AKP lahir dari Partai Kesejahteraan (Refah), induk dari Islamis Turki sejak 1980-an. Islamisme di Turki, meskipun secara tradisional tanpa kekerasan, namun memiliki enam karakteristik yang kejam; yaitu, anti-Barat, anti-Semit, anti-Israel, anti-Eropa, anti-*

---

<sup>24</sup>Shaimaa Maged, “The Egyptian Muslim, 8.

<sup>25</sup>Ayhan Simsek, “Dukungan Erdogan Terhadap Ikhwanul Muslimin di Kritik,” Deutsche Welle, <http://www.dw.com/id/dukungan-erdogan-terhadap-ikhwanul-muslimin-dikritik/a-17044458> (Diakses pada 26 Maret 2018)

<sup>26</sup>Middle East Monitor, “Turkey’s Erdogan: Muslim Brotherhood is Ideological, not Terrorist Organisation,” Middle East Monitor, <https://www.middleeastmonitor.com/20170217-turkeys-erdogan-muslim-brotherhood-is-ideological-not-terrorist-organisation> (diakses pada 26 Maret 2018)

*demokrasi, dan memegang sentimen anti-sekuler, yang semuanya diadopsi dari Ikhwanul Muslimin.*<sup>27</sup>

Faktor-faktor seperti ideologi, pribadi, atau pertimbangan dalam negeri, atau lebih mungkin kombinasi dari semua itu, turut memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan luar negeri AKP yang lebih konsisten dengan IM Global, dengan fokus pada membawa Turki lebih dekat dengan rezim Islamis seperti Iran, Sudan, dan pemerintah Hamas di Gaza.<sup>28</sup>

Di banyak poin, Turki juga telah berpindah dari negara Turki dengan Kebijakan Luar Negeri tradisional dalam sikapnya terhadap pemberontakan Arab (*arab revolt*). Turki mulai mengarahkan kebijakan untuk mendukung kerusuhan sipil (*gerakan sipil/civil unrest*) berbeda dengan gagasan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Dalam hal kebijakan luar negeri, Turki mulai untuk pertama kalinya dikenal karena hubungannya dengan partai oposisi non pemerintah, yaitu hubungan SMB (*Syrian Muslim Brotherhood*) dan Turki juga menarik banyak perhatian dari media asing atas kasus ini.<sup>29</sup> Sehingga, dapat dikatakan penerimaan atas gerakan IM oleh pemerintah Turki bersifat menyeluruh dari berbagai cabang IM di berbagai negara, tidak terbatashanya pada IM di Mesir saja.

Oleh karenanya, akibat dari tindakan represif dan pelarangan yang dihadapi IM di berbagai negara telah menciptakan lingkungan politik yang tidak kondusif bagi pencapaian tujuan gerakan IM. Sebagai gerakan sosial IM meski

---

<sup>27</sup>“We Are Witnessing the Muslim’s Brotherhood Take on Turkish Foreign Policy,” Hudson New York, <http://www.hudson-ny.org/883/we-are-witnessing-the-muslims-brotherhood-take-on-turkish-foreign-policy>.

<sup>28</sup>Ibid., 35.

<sup>29</sup>Bulut Gurpinar. “Turkey and The Muslim Brotherhood: Crossing Roads in Syria”, *Eurasian Journal of Social Sciences* 3(4), (2015).

berusaha untuk tetap mempertahankan eksistensi dan tujuan gerakan. Dalam hal ini, Pemerintah Turki mengambil langkah yang berbeda dengan negara lain dimana gerakan IM juga melakukan aktivitas sosial dan politik. Pemerintah Turki memilih kebijakan untuk menerima ribuan aktivis IM, serta mengizinkan IM untuk beroperasi secara penuh di negara mereka. Sehingga atas dasar ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang faktor dibalik penerimaan gerakan IM di Turki pasca musim semi Arab (*Arab Spring*).

## 1.2. Rumusan Masalah

*Ikhwanul Muslimin* sebagai gerakan transnasional telah menyebar di banyak negara. Bahkan sumber internal IM menyebutkan bahwa IM eksis di 70 Negara. Namun yang paling kentara cabang IM diluar Mesir adalah di Yordania, Suriah serta Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat). Gerakan IM di tiga negara tersebut telah ada semenjak tahun 1940an, bahkan aktivitas IM sudah menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik negara-negara tersebut. Meskipun demikian, sama halnya dengan di Mesir, hubungan IM dan pemerintah ataupun rezim yang berkuasa senantiasa mengalami pasang surut. Apalagi semenjak tahun 2013 IM dilarang untuk beraktivitas di negara Mesir sebagai negara tempat kelahiran gerakan tersebut.

Tidak seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Palestina, Pemerintah Turki justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi aktivitas sosial dan politik IM di negara mereka. Oleh karenanya, sangat menarik perhatian peneliti ketika Pemerintah Turki membebaskan setiap aktivitas struktural maupun individual IM untuk beroperasi di teritorial Turki. Sehingga, menurut peneliti, perlu pengkajian

lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah Turki saat ini untuk menerima gerakan IM di negara mereka pasca *Arab Spring*.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah, “*Faktor Apa yang Mempengaruhi Penerimaan Ikhwanul Muslimin di Turki Pasca Musim Semi Arab (Arab Spring)?*”

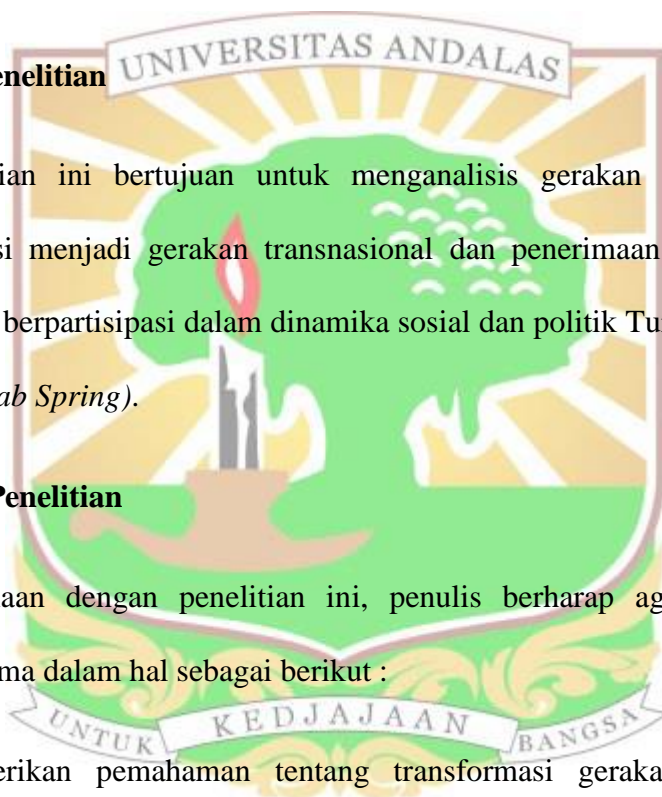
### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan IM yang telah bertransformasi menjadi gerakan transnasional dan penerimaan atas organisasi tersebut untuk berpartisipasi dalam dinamika sosial dan politik Turki pasca musim semi Arab (*Arab Spring*).

### 1.5. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis berharap agar memberikan manfaat terutama dalam hal sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang transformasi gerakan IM menjadi gerakan sosial transnasional (*Transnational Social Movement*), begitupun juga dengan analisis tentang hubungan antara gerakan sosial dan elit pemerintahan.
2. Menambah koleksi literatur Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas yang berkaitan dengan gerakan sosial berbasis Islam yang terinstitusionalisasi dan bergerak secara transnasional.



## 1.6. Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan pencantuman Studi Pustaka dimaksudkan untuk menemukan kebaruan dari penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya yang tema atau permasalahannya relatif sama. Selain itu, Studi Pustaka juga berguna bagi penulis untuk menentukan fokus arah penelitian dan sudut pandang yang digunakan. Berikut ini ,ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan untuk dapat dijadikan Studi Pustaka.

Skripsi dari M. Sya'roni Rofii (2008), berjudul "*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*"<sup>30</sup> yang menjelaskan tentang kemunculan Partai AKP dalam dinamika sosial-politik di Negara Turki. Penelitian ini mengemukakan tentang keikutsertaan Partai AKP yang berbasis Islam Politik di dalam sistem Pemerintahan di Turki. Dengan mengusung nilai-nilai Islam, kehadiran Partai AKP di Turki bagi sebagian orang dianggap merupakan ancaman untuk keberlangsungan Sekularisme Turki. Adapun pembeda dari Partai AKP dengan partai lain berhaluan Islam adalah kemampuan AKP untuk menyesuaikan diri dengan kultur demokrasi di Turki. Mereka cukup kooperatif dengan militer, sebagai upaya antisipasi atas trauma berkepanjangan yang menimpa partai-partai berhaluan Islam seperti AKP, layaknya Partai *Refah*, Partai *Fezilet* dan *Saadet* yang akhirnya dibubarkan oleh Rezim Pemerintah. Disamping itu, kegemilangan AKP sebagaimana dijelaskan dalam skripsi ini, juga disokong oleh sosok Recep

---

<sup>30</sup>M. Sya'roni Rofii, "*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*" ( Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Tayib Erdogan yang memang sosok sentral dalam AKP. Hal ini juga dibarengi oleh komitmen Partai untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai Sekularisme. Hanya saja dari penelitian tersebut, tidak dijelaskan persinggungan antara elit-elit (individu) di AKP dengan *Ikhwanul Muslimin*, yang relatif mempengaruhi arah dan kebijakan AKP untuk memilih haluan Islam Politik.

Selanjutnya, Penulis menggunakan Penelitian dari Bulut Gurpinar (2015) yang menjelaskan tentang masuknya pengaruh *Ikhwanul Muslimin* Suriah (*Syirian Moslem Brotherhood*) ke Turki. Penelitian yang berjudul, "*Turkey and the Muslim Brotherhood: Crossing Roads in Syria*"<sup>31</sup>, memuat beberapa temuan yang sekiranya relevan bagi penelitian penulis. Bulut Gurpinar menjelaskan di banyak titik, Turki telah bertransformasi dari negara Turki dengan Kebijakan Luar Negeri tradisional dalam sikapnya terhadap pemberontakan Arab menuju yang Turki mulai mendukung gerakan sipil (*civil unrest*). Berbeda halnya dengan gagasan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, kasus ini memperlihatkan pergeseran signifikan dari prinsip dominan mempertahankan *status quo* dalam Kebijakan Luar Negeri tradisional Turki. Aturan kebijakan luar negeri tradisional "tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain" ditinggalkan oleh Turki, dengan harapan rezim Suriah akan segera berubah.

Penelitian tersebut juga menampilkan hubungan yang erat antara Turki dengan *Ikhwanul Muslimin*. Bahwasanya visi ideologis Partai AKP yang tengah berkuasa di Turki telah sejalan dengan visi *Ikhwanul Muslimin*. Selain itu, juga dijelaskan sejarah awal mula Islamisme di Turki yang disponsori oleh *Ikhwanul*

---

<sup>31</sup>Bulut Gurpinar. "Turkey and The Muslim Brotherhood: Crossing Roads in Syria", *Eurasian Journal of Social Sciences* 3(4), (2015): 22-36.

*Muslimin* serta pasang surut keterlibatan *Ikhwanul Muslimin* dalam dinamika sosial-politik di Turki. Namun, penelitian tersebut tidak mendudukan secara jelas kategorisasi dari *Ikhwanul Muslimin*.

Disamping itu, penulis juga merujuk pada Skripsi yang ditulis oleh Miftahuddin (2008) untuk melihat secara langsung masuknya pengaruh *Ikhwanul Muslimin* di suatu Negara. Skripsi yang berjudul, “*Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia*”<sup>32</sup> menjelaskan dengan sangat deskriptif tentang relasi antara *Ikhwanul Muslimin* dan PKS. Hubungan tersebut terbangun melalui kontak antara tokoh-tokoh yang nantinya bernaung di PKS dengan IM di Mesir. Apalagi disebutkan bahwa dominan dari elit-elit di PKS merupakan orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan tokoh IM di Mesir. Walaupun tidak memiliki keterkaitan secara struktural-organisasional dengan IM, namun diakui oleh elit PKS, bahwa PKS memiliki banyak persamaan pemikiran dengan IM. Pernyataan dari pemikir Ikhwan Kontemporer Prof. Dr. Yusuf al-Qordhowy mengidentikkan PKS sebagai kepanjangan tangan dari *Ikhwanul Muslimin* menjadi salah satu bukti kuat mengenai hubungan antara IM dan PKS.

Mengenai kondisi kontemporer dinamika perpolitikan Turki semenjak berkuasanya Partai AKP. Penulis melakukan analisis berdasarkan pada penelitian Eric Edelman et al. (2015), berjudul “*Turkey Transformed: The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP*”<sup>33</sup>. Dalam

---

<sup>32</sup>Miftahuddin, “Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>33</sup>Eric Edelman et al., *Turkey Transformed: The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP* (Washington: Bipartisan Policy Center, 2015)

penelitian ini, ada beberapa poin penting yang mesti dijadikan pijakan dalam analisis keseluruhan penelitian penulis. Eric Edelman menjelaskan dalam penelitian tersebut mengenai sejarah awal mula kemunculan Islamisme (Islam Politik Turki) melalui gerakan *Milli Gorus* yang diprakarsai oleh Necmetin Erbakan. Tokoh yang dikenal sebagai bapak Islam Politik Turki sedangkan gerakan *Milli Gorus* merupakan cikal bakal dari Ideologi Islamis Modern Turki. Erbakan juga menyebut gerakan Islam Politik Turki setelah Perang Dunia II sangat dipengaruhi oleh *Ikhwanul Muslimin*.

Disamping itu, pada penelitian tersebut Edelman mencoba membandingkan kesuksesan Erbakan dengan AKP saat sekarang ini. Selama 30 tahun memimpin gerakan Islam Politik Turki, puncak dari keberhasilan Erbakan adalah ketika dia menjadi Perdana Menteri. Hingga akhirnya, digulingkan melalui kudeta militer. Oleh karenanya, AKP hadir untuk merubah pola-pola ortodoks dan konservatif yang dilancarkan oleh Erbakan. AKP memakai taktik untuk berkompromi dengan nilai-nilai demokrasi dan sekularisme Turki. Mereka sengaja meninggalkan taktik Islamisme yang ketat dan tegas untuk mendapatkan dukungan militer.

Dalam menganalisis mengenai eksistensi *Ikhwanul Muslimin* Global dan hubungannya dengan pemerintah Turki sekarang ini. Penulis merujuk pada penelitian dari Steve G. Merley (2011) yang berjudul "*Turkey, Global Muslim Brotherhood and Gaza Flotilla*".<sup>34</sup> Penelitian ini menunjukkan tentang realitas *Ikhwanul Muslimin* Global yang memiliki koneksi dengan pemerintahan Turki

---

<sup>34</sup>Steven G. Merley, *Turkey, The Global Muslim Brotherhood, and the Gaza Flotilla* (Jerusalem: Jerusalem Centre for Public Affairs, 2011).



saat ini. Studi kasus tentang keterlibatan Turki pada bantuan kemanusiaan Gaza pada tahun 2010 menyiratkan pengaruh besar IM dalam munculnya kebijakan tersebut. Steve G. Merley juga menyebutkan bahwasanya Turki telah menjadi pusat gerakan baru bagi jaringan *Ikhwanul Muslimin*, apalagi semenjak aktivitas IM di Mesir mengalami tindakan pelarangan dan pengintimidasian.

Penelitian ini menjadi sangat penting bagi penulis dalam menyediakan data-data pokok mengenai analisa penulis tentang keberhasilan IM di Turki. Hanya saja dalam penelitian tersebut, Steve G. Merley tidak bersandarkan pada konsep Gerakan Sosial Transnasional (*Transnational Social Movement*) untuk menjelaskan fenomena gerakan IM.

### **1.7. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dalam perspektif sosial konstruktivis. Perspektif ini muncul bersamaan dengan semakin maraknya penelitian secara kuantitatif, yang juga telah mengiringi munculnya teori sosial konstruktivis dalam gerakan sosial. Meskipun teori-teori konstruktivis biasanya dibingkai berlawanan dengan pandangan strukturalis, ada keinginan yang berkembang dikalangan peneliti terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan teori gerakan politik struktural dengan teori konstruktivis yang berakar pada psikologi sosial dan sosiologi budaya.<sup>35</sup>

Dengan bersandarkan pada pemahaman tersebut, gerakan sosial tidak lagi memandang bahwa manusia adalah wayang tanpa emosi dari kondisi material mereka. Gerakan sosial mencoba untuk mendefinisikan kembali apa yang sedang

---

<sup>35</sup>Pamela E. Oliver, Jorge Cadena-Roa and Kelley D. Strawn, "Emerging Trend in the Study of Protest and Social Movement," *Research in Political Sociology* 12 (2003): 11.

terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Pandangan konstruktivis berpendapat bahwa gerakan sosial bukan hanya tentang mobilisasi pemrotes massa, kemunculan kekuatan, dan ancaman gangguan ketertiban umum. Gerakan sosial dalam perspektif konstruktivis juga memiliki dimensi moral dan budaya yang melibatkan pemberontakan serta kesadaran, keyakinan, dan praktik publik.<sup>36</sup>

Menurut Merton, perspektif sosial-konstruktivis dapat dirangkum dalam istilah yang disebut sebagai teorema dasar bagi ilmu sosial: “Jika manusia mendefinisikan situasi sebagai sebuah kenyataan, maka hal itu akan menjadi kenyataan dalam konsekuensinya”.<sup>37</sup> Tidak ada satu pun cara bagi orang-orang untuk menentukan keadaan dan menghubungkan makna dengan hal-hal dan hubungan. Secara analitis, proses ini melibatkan dimensi dan proses psikologis, sosial dan budaya. Dimensi ini berinteraksi dengan sumber daya, relasi antara peluang dan strategi, serta konflik dan keterbukaan.<sup>38</sup>

### 1.7.1. Gerakan Sosial Transnasional (*Transnational Social Movement*)

Dalam menganalisis fenomena gerakan IM yang telah bertransformasi menjadi gerakan transnasional, penulis menggunakan konsep gerakan sosial transnasional yang merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial (*social movement*). Menurut Sanjeev Khagram et.al, Gerakan Sosial Transnasional (*Transnational social movement*) merupakan sekumpulan aktor dengan tujuan dasar yang sama dan solidaritas yang saling terhubung melintas batas negara serta memiliki kemampuan untuk mendorong koordinasi dan keberlanjutan dari

---

<sup>36</sup>Ibid., 11.

<sup>37</sup> Thomas, W. I. & Thomas, D. S. (1928). *The Child in America*. New York: Knopf.

<sup>38</sup>Ibid., 12.

mobilisasi sosial di lebih dari satu negara untuk secara lebih luas mempengaruhi perubahan sosial.<sup>39</sup> Selain itu, Jackie Smith et. al. berpendapat bahwa gerakan sosial akan disebut sebagai gerakan sosial transnasional ketika gerakan tersebut telah melibatkan kesadaran untuk berjuang membangun kerjasama transnasional seputar tujuan bersama yang meliputi perubahan sosial.<sup>40</sup>

Kebanyakan gerakan sosial transnasional bersifat organisasi formal yang memiliki konstitusi (Aturan Dasar), anggota staf, rekening bank, dan dewan direksi. Sementara itu ada juga yang bersifat kelompok lingkungan atau persahabatan yang bertemu secara informal dan tidak teratur serta saling mendukung kerjasama dalam mempromosikan perubahan sosial.<sup>41</sup> Hal ini selaras dengan gerakan IM yang memiliki basis dari tingkat paling kecil (keluarga) sampai pada tingkat negara dan jejaring lintas batas negara.

Berbeda halnya dengan gerakan sosial dalam satu negara, gerakan sosial transnasional terdiri dari anggota yang lebih dari dua negara, memiliki beberapa struktur formal, dan mengkoordinasikan strategi melalui sebuah sekretariat internasional. Struktur keanggotan dari gerakan transnasional tersebut memfasilitasi komunikasi dan aksi melintas batas negara sebagaimana lembaga antar pemerintahan (*intergovernmental institutions*).<sup>42</sup> Melalui komunikasi secara regular, organisasi dan aktivis akan mampu untuk membagi informasi mengenai strategi dan teknik, mengkoordinasikan antar aktivis, atau bahkan melakukan aksi

---

<sup>39</sup>Sanjeev Khagram, James V. Riker and Kathryn Sikkink, eds., *Restructuring World Politics: Transnational Social Movement, Networks, and Norms* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002), 8.

<sup>40</sup>Jackie Smith, Charles Chatfield and Ron Pagnucco, eds., *Transntional Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond The State* (New York: Syracuse University Press, 1997), 60.

<sup>41</sup>Jackie Smith, "Transnational Social Movement," in *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, ed. David A. Snow, Donatella della Porta, Bert Klandermans, and Doug McAdam (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003), 1.

<sup>42</sup>Jackie Smith, Charles Chatfield and Ron Pagnucco, eds., *Transntional* , 61.

kolektif yang benar-benar transnasional. Seperti halnya gerakan sosial nasional, gerakan sosial transnasional meliputi aktor politik, seperti individu, kelompok keagamaan, asosiasi profesional, dan kelompok sosial lainnya.<sup>43</sup>

Disamping itu, tujuan dari gerakan sosial dapat dibedakan melalui aktor dan sumberdaya yang di mobilisasi dan sejauhmana mereka berkomunikasi, berkonsultasi, koordinasi dan bekerjasama dalam arena internasional.<sup>44</sup> Kemudian, pengorganisiran jaringan aktor pada gerakan sosial transnasional dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Secara khusus, gerakan sosial transnasional juga berusaha untuk melibatkan sejumlah besar individu dan kelompok yang tidak secara rutin bekerja untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, kemungkinan untuk mempengaruhi ditentukan oleh karakteristik politik dan sosial dari masyarakat domestik atau transnasional dimana suatu gerakan beroperasi.<sup>45</sup>

Dalam hal memobilisasi konstituen, gerakan sosial transnasional melakukannya melalui aksi kolektif, seringkali melalui protes atau tindakan yang mengganggu. Definisi ini sejalan dengan pengertian dari *domestic social movement* yang menekankan pada mobilisasi dan/atau disrupsi sebagai penegasan dari karakteristik gerakan. Teoritikus gerakan sosial berpendapat bahwa gerakan akan efektif dalam membawa perubahan sosial apabila berhubungan dengan

---

<sup>43</sup>Ibid., 60.

<sup>44</sup>Ibid., 60.

<sup>45</sup>Ibid., 61.

kemampuan untuk melakukan tindakan yang mengganggu atau ancaman terhadap tatanan sosial yang ada.<sup>46</sup>

Poin penting dari gerakan transnasional adalah bahwa mereka memobilisasi orang-orang melintasi batas-batas negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mereka membantu orang-orang mendefinisikan kepentingan dan identitas mereka dengan cara yang melampaui batas negara-bangsa (*nation state*) tradisional. Dengan memfasilitasi komunikasi rutin antara orang-orang dari daerah dan budaya yang sangat berbeda, mereka membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan bersama sambil membuat persahabatan lintas negara lebih memungkinkan terjadi.<sup>47</sup> Atas dasar inilah TSM menjadi aktor penting dalam sistem internasional.

Selanjutnya, ketika gerakan semakin berkembang, peran negara diubah oleh para aktivisnya. Transformasi peran negara berkembang dari perubahan lingkungan, kognitif, dan relasional. Kategori yang ada tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan di balik muncul dan berkembangnya tindakan kolektif transnasional, salah satunya adalah gerakan sosial transnasional.<sup>48</sup>

### 1. Perubahan Lingkungan (*Environmental Change*)

Semenjak akhir tahun 1980an, tiga jenis perubahan dalam lingkungan internasional telah mendorong terbentuknya sebuah aktivitas transnasional. *Pertama*, kehancuran Blok Uni Soviet mendorong berkembangnya tindakan atau aksi aktor non-negara yang sebelumnya pada era perang dingin dihambat. *Kedua*,

---

<sup>46</sup>Ibid., 8.

<sup>47</sup>Ibid., 2.

<sup>48</sup>Donatella D. Porta and Sidney Tarrow, eds., *Transnational Protest and Global Activism: People, Passions, and Power* (Lanham: Rowman and Littlefield Publisher, 2005), 7.

perkembangan media komunikasi elektronik dan berkembangnya penerbangan murah telah mempermudah aktor-aktor gerakan yang sebelumnya terisolasi dalam berkomunikasi, untuk kemudian dapat berkolaborasi dengan satu sama lain secara lintas batas negara. Terakhir, yang paling penting dari lingkungan internasional dapat disorot melalui meningkatnya *power* korporasi transnasional dan institusi internasional, perjanjian tentang regulasi ekonomi internasional dan kegiatan-kegiatan berskala internasional seperti *global summit* of World Bank, G8, dan juga WTO.<sup>49</sup> Dalam konteks penelitian tersebut penulis melihat perubahan lingkungan yang terjadi merujuk pada peristiwa *Arab Spring* dan perubahan arah kebijakan Turki terkait regional Timur Tengah.

Sementara beberapa analis beranggapan bahwa globalisasi sudah cukup untuk menciptakan gerakan sosial global, namun perubahan dalam lingkungan global maupun regional tidaklah cukup untuk menciptakan aktivitas transnasional. Perubahan kognisi didalam dan perubahan hubungan antar aktor harus mendorong secara aktif untuk mewujudkan perubahan fundamental. Poin pentingnya berada pada penjelasan bahwa globalisasi dapat dilihat dengan sangat baik dalam perspektif yang berubah dari aktor non negara yang aktif di kancah internasional, sementara perubahan kognisi dapat diamati dalam pembentukan jaringan aktivis transnasional.<sup>50</sup>

## 2. Perubahan Kognitif (*Cognitive Change*)

Perubahan kognitif berkaitan erat dengan taktik dan pembedaan (*framing*) gerakan sosial yang tampaknya berhasil di lebih dari satu tempat yang

---

<sup>49</sup>Ibid., 7.

<sup>50</sup>Ibid., 8.

telah dilembagakan. Selain itu, taktik dan strategi pemerintah dan kepolisian yang diadaptasi untuk menantang gerakan pada tingkat transnasional menuntut elaborasi rencana umum untuk aksi kolektif di pihak aktivis.<sup>51</sup> Hal ini relevan dengan konteks tantangan yang dihadapi IM di berbagai negara seperti, Mesir, Yordania maupun Suriah. Sehingga, IM mengambil rencana berbeda agar gerakan mereka tetap eksis, salah satunya dengan beroperasi di Turki melalui serangkaian taktik dan *framing* agar gerakan tersebut diterima.

Pengalaman “vertikal (berhadapan dengan rezim atau pemerintahan)” dari masing-masing gerakan sosial nasional yang beroperasi secara internasional telah menempatkan banyak aktor dalam kontak dengan orang lain seperti mereka dan dengan demikian mendorong mereka untuk mengembangkan kerangka (*framing*) yang lebih mengglobal daripada yang ditawarkan oleh daya tarik gerakan dalam lingkup domestik.<sup>52</sup>

### 3. Perubahan Relasional/Hubungan (*Relational Change*)

Perkembangan paling mencolok dalam dasawarsa terakhir menunjukkan adanya mekanisme relasional yang menyatukan para aktor nasional dalam koalisi transnasional. Keberadaan lembaga-lembaga internasional sebagai sasaran “vertikal” yang umum telah membantu menghasilkan pembentukan koalisi transnasional “horisontal” melalui jaringan aktivis yang terbentuk di sekitar mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid., 8.

<sup>52</sup>Ibid., 9.

<sup>53</sup>Ibid., 9.

Hubungan antara gerakan dan pemerintah merupakan sumber utama perubahan. Gerakan sosial tidak bertindak dalam ruang hampa dan pada kenyataannya, pengaruh terkuat pada perilaku dan taktik mereka adalah perilaku dan taktik dari pemerintah yang mereka tantang. Dekade terakhir ini telah menunjukkan fenomena bahwa pemerintah juga meniru satu sama lain, oleh karena itu mengarah ke peningkatan kesamaan dalam konteks dimana kampanye gerakan dan protes terjadi. Meningkatnya interaksi akan memfasilitasi pertumbuhan identitas umum dan karenanya mengurangi partikularisme nasional.<sup>54</sup>

Singkatnya, selain merefleksikan keberhasilan, tetapi juga pada kegagalan tindakan kolektif transnasional, serta pengalaman bekerja sama dalam kampanye sementara, telah mengarah pada penciptaan struktur organisasi transnasional dan pembentukan identitas transnasional. Tentu saja, gerakan sosial tetap berusaha mempertahankan karakter nasional mereka, akan tetapi tindakan ini terikat pada jenis-jenis peluang politik yang ada di masing-masing negara, walaupun begitu gerakan sosial juga semakin berinteraksi secara lintas negara.<sup>55</sup> Hal inilah yang berpengaruh kuat terhadap pembentukan gerakan sosial transnasional (*transnational social movement*).

Lebih jauh, uraian mengenai gerakan sosial transnasional telah menarik perhatian khusus dari ilmuwan HI. Terutama, dalam menganalisis hubungan antara organisasi gerakan sosial dengan aliansi elit dalam instansi pemerintahan

---

<sup>54</sup>Ibid., 9-10.

<sup>55</sup>Ibid., 10.



atau intrapemerintahan, media ataupun bisnis, yang sangat berhubungan dengan peluang politik.<sup>56</sup>

### 1.7.1.1. *Elite Alliance*

Studi tentang dampak gerakan sosial yang terkait dengan “kesuksesan” gerakan sosial adalah bahasan yang tengah umum dikaji.<sup>57</sup> Menurut Tarrow bahwa ada beberapa elemen penting terkait kesuksesan gerakan sosial seperti kekuatan untuk mengganggu, sumber daya, faksionalisme, sekutu, dan akses aktor baru (mis., Perubahan dalam parlemen).<sup>58</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Mayer Zald dalam essay berjudul *mobilization* bahwa perlu adanya perluasan pandangan terhadap gerakan sosial, dimana gerakan sosial mesti masuk lebih dalam ke politik. Sebagai contoh, Margaret Keck and Kathryn Sikkink telah mengenalkan konsep “*transnational advocacy networks*,” yang meliputi aktor seperti organisasi penelitian dan advokasi dari NGOs Internasional dan Domestik, gerakan sosial lokal, yayasan, media, gereja (keagamaan), persekutuan dagang, organisasi konsumen, dan bagian dari cabang eksekutif dan / atau parlemen pemerintah. Beth Schaefer Caniglia melihat semua dimensi ini sebagai aspek utama dari hubungan

---

<sup>56</sup>Jackie Smith et. al., *Transntional Social Movements*, 65.

<sup>57</sup>Giugni, Marco, “How Social Movements Matter: Past Research, Present Problems, Future Developments.” Pp. xiii–xxxiii in *How Social Movements Matter*, edited by Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly (Minneapolis: University of Minnesota Press. 1999)

<sup>58</sup>Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. (New York: Cambridge University Press., 1998), 163.

antara elit dan gerakan, bahwasanya elit dan gerakan berbagi ideologi yang serupa mengenai perubahan sosial.<sup>59</sup>

Untuk menjelaskan mengenai hubungan antara elit politik dan gerakan sosial, penulis menggunakan salah satu konsep dari teori struktur peluang politik (*political opportunity structure*) menurut Beth Schaefer, yaitu *elite alliances* (Aliansi Elit).

Aliansi elit seringkali dikonseptualisasikan sebagai dimensi makrostruktur dari struktur peluang politik, hal ini menyiratkan bahwa aliansi elit akan memberikan efek menyeluruh pada seluruh gerakan sosial. Selanjutnya juga perlu diperluas pandangan terhadap lensa konseptual dan analisa aliansi elit sebagai ikatan dua arah (*diadik*) antara elit politik dan aktor gerakan. Hubungan semacam itu mempengaruhi masing-masing aktor individu gerakan secara berbeda, tergantung pada sifat dan seberapa kuat ikatan yang diusahakan dengan elit.<sup>60</sup>

Teori struktur peluang politik (*Political Opportunity Structure/POS*) memiliki tesis bahwa aliansi elit dapat mempengaruhi karakteristik gerakan, seperti pilihan taktik, mobilisasi dan tingkat kesuksesan. Ketika simpati elit ada, kemungkinan untuk sukses semakin meningkat, sementara jika simpati elit tidak ada, maka kesuksesan akan sulit didapatkan.<sup>61</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pendekatan yang diajukan Zald untuk gerakan sosial adalah dengan menggabungkan realitas yang tidak tersusun

---

<sup>59</sup>Beth Schaefer Caniglia, "Elite Alliances and Transnational Environmental Movement Organizations," in *Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements*, ed. Jackie Smith and Hank Johnston (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publisher, 2002), 153-154.

<sup>60</sup>Ibid., 154.

<sup>61</sup>Ibid., 155.

dimana aktivis gerakan dan elit politik sering berbagi keyakinan dan kepentingan yang sama. “Birokrat, legislator, hakim, dan eksekutif mengidentifikasikan diri dengan gerakan dan berbagi ideologi dengan orang-orang yang diberi label aktivis (aktor gerakan sosial).”<sup>62</sup>

## 1.8. Metodologi

Agar suatu penelitian berjalan dengan benar maka diperlukan satu metodologi. Yang dimaksud dengan Metodologi adalah prosedur yang dipakai dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena yang diteliti.<sup>63</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan temuan-temuan dan fakta yang ada dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan aktivitas menempatkan pengamat dengan realitas. Hal tersebut terdiri dari serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, konservasi, foto, rekaman, dan memo. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari realitas, dengan mencoba untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang ada.<sup>64</sup>

Metode Penelitian Kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan maupun kemungkinan teori yang digunakan dan pembahasan tentang permasalahan dalam riset penelitian diubah dari makna yang dianggap permasalahan individu atau

---

<sup>62</sup>Ibid., 156.

<sup>63</sup>Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 2.

<sup>64</sup>John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Second Edition (California: Sage Publication, 2007), 36.

kelompok menjadi permasalahan sosial atau manusia secara keseluruhan. Penelitian Kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, sehingga, terbentuk suatu analisis data yang mapan dan terpolakan.<sup>65</sup>

### 1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dimana fenomena yang ada akan dideskripsikan menjadi penjabaran yang lebih rinci yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti.<sup>66</sup> Sehingga, menjadi pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di masa lampau terhadap fenomena yang muncul terkini.

### 1.8.2. Batasan Penelitian

Dalam satu penelitian diperlukan batasan masalah agar fokus terhadap objek penelitian yang akan diteliti dapat dipersempit. Sehingga, hasil penelitian akan koheren dengan latar belakang serta rumusan masalah. Batasan masalah juga dimaksudkan agar konsistensi penulis dapat terjaga agar tulisan tidak melebar.

Batasan waktu pada penelitian ini dimulai dari rentang tahun 2006 sampai dengan 2013 ketika gerakan IM diterima secara penuh di negara Turki. Sementara batasan masalah akan berfokus pada aktivitas politik IM sebagai gerakan transnasional di berbagai negara dan legitimasi yang tidak begitu baik yang

---

<sup>65</sup>Ibid., 37.

<sup>66</sup>Iskandar.2008.Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: Gaung Persamda Press, 186

mereka dapatkan dari negara tempat mereka beroperasi. Atas alasan inilah, peneliti perlu untuk menganalisis faktor-faktor dibalik penerimaan Turki atas gerakan IM.

### 1.8.3. Unit Analisis dan Level Analisis

Unit analisis dimaknai sebagai objek yang perilakunya hendak diteliti (disebut juga “variabel dependen”). Dan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang digunakan. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah kelompok, yakni *Ikhwanul Muslimin*. Sementara unit eksplanasi adalah Penerimaan Gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Turki, sedangkan Level Analisisnya adalah Negara.

### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimulai dengan sebuah isu atau permasalahan, mengkaji dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan isu tersebut, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya secara keseluruhan.<sup>67</sup>

Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Data ini diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku maupun referensi-referensi *online* dari situs resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur/kepuustakaan (*literature research*).

---

<sup>67</sup>John W. Creswell, *Qualitative*, 38.

### 1.8.5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mempersiapkan dan menyusun data untuk dianalisis, sehingga kemudian dapat dilakukan seleksi terhadap data yang ada agar sesuai dengan tema dan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa secara keseluruhan terhadap literatur dan dokumen yang relevan dengan pembahasan. Dikarenakan penelitian ini bersifat historis dimana data dan kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan variabel penelitian akan sangat penting untuk dijelaskan. Sehingga, hasil analisis secara keseluruhan dari data harus bersifat runut berdasarkan interpretasi subjektif dari peneliti terhadap data.

## 1.9. Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### Bab II : *Ikhwanul Muslimin* sebagai Gerakan Sosial Transnasional

Pada bab ini akan dijelaskan identifikasi *Ikhwanul Muslimin* sebagai gerakan sosial transnasional (*Transnational Social Movement*), dimana cabang, pola serta tujuan gerakan.

### Bab III : Penerimaan Turki Terhadap *Ikhwanul Muslimin* Pasca Arab Spring

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah persinggungan antara *Ikhwanul Muslimin* dan elit pemerintahan Turki.

#### **Bab IV: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Gerakan IM di Turki Pasca Musim Semi Arab (*Arab Spring*)**

Pada bab ini akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan gerakan IM di Turki pasca *Arab Spring*.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi ringkasan dan kesimpulan dari penelitian yang berdasarkan pertanyaan penelitian.

